

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan yang bermutu merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Berkaitan dengan penjaminan mutu, pasal 2, ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga program tersebut merupakan bentuk penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan.

Dalam pendidikan di Indonesia, pemerintah telah memberikan rambu-rambu, bagaimana menciptakan sekolah/madrasah yang memiliki kualitas baik. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan minimal kualitas pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu: a) Standar isi, b) Standar Kompetensi Kelulusan, c) Standar pendidik dan tenaga pendidik, d) Standar Pengelolaan., e) Standar Penilaian, f) Standar Sarana dan Prasarana, g) Standar Proses, h) Standar Biaya Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia, untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan (SNP) akan mampu menciptakan suatu kegiatan belajar mengajar (kbm) dengan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan pada aplikasi dan implementasinya dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan jika mampu dikuasai oleh setiap tenaga pengajar. Dan hal ini diyakini mampu mengubah cara pandang terhadap pendidikan.

Pengendalian mutu (*quality control*) dalam manajemen mutu merupakan suatu *system* kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pengendalian mutu pada program pendidikan nonformal diperlukan agar produk layanan pendidikan nonformal terjaga kualitasnya sehingga memuaskan masyarakat sebagai pelanggan. Pengendalian mutu adalah proses manajemen yang di dalamnya kita mengevaluasi kinerja nyata, membandingkan kinerja nyata dengan tujuan, mengambil tindakan terhadap perbedaan. Sehingga pengendalian mutu adalah suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Pengendalian mutu memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti, sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi.

Beberapa fenomena lain yang mengiringi dunia pendidikan terutama di Indonesia, yakni: rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas Husaini (2008) , menyebutkan ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan, yaitu: (1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional

menggunakan pendekatan *educational production function* atau input-input analisis yang tidak *consisten*; (2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; (3) peran serta masyarakat, khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.

Banyak upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan telah dilakukan, namun pada kenyataannya kurang atau bahkan tidak berhasil. Hal ini menurut Hasan dan Ali (2003) disebabkan ada dua, yakni *Pertama*, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan *output* yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macrooriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Akan tetapi, dalam konteks paradigma desentralisasi dan otonomi pendidikan, sekolah mempunyai wewenang yang sangat besar untuk mengatur dan mengelola sekolahnya sendiri. Otonomi yang lebih besar dari institusi sekolah ini menuntut adanya kemauan dan kemampuan seluruh personel sekolah yang lebih berkualitas. Hal ini berkaitan erat dengan implementasi berbagai prinsip dan paradigma baru

manajemen pendidikan, yang perlu diperhatikan seperti transparansi, akuntabilitas, fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipasi seluruh warga dan *stakeholders*, penyederhanaan birokrasi, dan penyaluran aspirasi dengan sistem *bottom up*, serta penerapan manajemen terbuka (*open management*).

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, manajemen sekolah mempunyai peran yang cukup signifikan, di samping faktor dari luar. Sekolah sebagai organisasi sosial yang menyediakan layanan pembelajaran bagi masyarakat, maka sekolah memiliki wewenang untuk mengatur dirinya dari berbagai input sekolah mulai dari manusia (*man*), uang (*money*), bahan-bahan (*materials*), metode-metode (*methods*) dan mesin-mesin (*machines*), guna mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik yang dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah, antara lain penguatan regulasi hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak usia sekolah, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik, penguatan dan peningkatan kompetensi guru, perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan buku ajar dan media pelajaran. Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Berdasarkan masalah ini maka dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan selain melalui cara-cara yang di atas, juga perlu adanya peningkatan mutu manajemen pengendalian mutu pendidikan, salah satu diantaranya dengan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, pengendalian output yang berorientasi pada mutu.

Berdasarkan masalah-masalah yang ada peneliti melakukan observasi di SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango. Hasil pengamatan yang diperoleh adalah : masih kurangnya sumber daya manusia yang mendukung dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, serta kurangnya pengembangan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh sekolah

Dari beberapa masalah yang peneliti dapatkan, kemudian peneliti memilih untuk melakukan penelitian terhadap pengendalian mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kabila, berkaitan dengan : Strategi perencanaan pengendalian mutu di SMA Negeri 1 Kabila, Strategi pelaksanaan pengendalian mutu di SMA Negeri 1 Kabila dan Strategi monitoring dan evaluasi program pengendalian mutu di SMA Negeri 1 Kabila. Adapun formulasi judul yang peneliti ambil dalam penelitian ilmiah ini adalah **“Analisis Pengendalian Mutu di SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai:

1. Bagaimana Strategi Perencanaan Pengendalian Mutu di SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango ?
2. Bagaimana Strategi Pelaksanaan Pengendalian Mutu di SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango ?
3. Bagaimana Strategi Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Mutu di SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Strategi Perencanaan Pengendalian Mutu di SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango ?
2. Untuk mengetahui Strategi Pelaksanaan Pengendalian Mutu di SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango ?
3. Untuk mengetahui Strategi Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Mutu di SMA Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Organisasi Sekolah
 penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan pengendalian mutu di sekolah.
2. Kepala sekolah
 penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman sebagai salah satu solusi alternatif terhadap permasalahan kualitas pendidikan di Sekolah.
3. Guru
 penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun langsung sebagai referensi mengenai pemahaman pentingnya peran kepala sekolah dalam menerapkan pengendalian mutu di sekolah.